

PENGARUH PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

Revina Cania Putri¹, Ario Pamungkas², Alvaro Eleazar Tamado M³,
Bayu Aji Saputra⁴, Muhamad Faiz Athallah⁵

Universitas Esa Unggul

millicania81@student.esaunggul.ac.id

Abstract

This study examines the challenges and efforts to strengthen democracy in post-Reformasi Indonesia. Although the transition to a more open system has increased political participation, the principles of equality, justice, and inclusiveness have not been fully realized. Key challenges include low quality of participation, money politics, corruption, threats to press freedom, socio-political polarization, unequal access to information and political education, oligarchy domination, and weak democratic institutions. This research uses a literature study method to analyze the dynamics of Indonesian democracy, democratic theory, political participation rates, and the challenges faced. The results show the need for a multidimensional approach to overcome these challenges, focusing on strengthening community-based democracy through inclusive political education, positive use of social media, increased government transparency and accountability, and the use of technology for digital participation. Managing the phenomenon of populism is also important. Strengthening quality participation, law enforcement, institutional reform, and constructive management of socio-political issues are crucial for realizing a substantive and sustainable democracy.

Keywords: Indonesian Democracy, Political Participation, Democratic Challenges, Democratic Strengthening, Reform, Society.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan dan upaya penguatan demokrasi di Indonesia pasca Reformasi. Meskipun transisi menuju sistem yang lebih terbuka telah meningkatkan partisipasi politik, prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas belum sepenuhnya terwujud. Tantangan utama meliputi rendahnya kualitas partisipasi, politik uang, korupsi, ancaman terhadap kebebasan pers, polarisasi sosial-politik, ketidaksetaraan akses informasi dan pendidikan politik, dominasi oligarki, dan kelembagaan demokrasi yang lemah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dinamika demokrasi Indonesia, teori demokrasi, tingkat partisipasi politik, dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan multidimensional untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan fokus pada penguatan demokrasi berbasis masyarakat melalui pendidikan politik inklusif, pemanfaatan media sosial secara positif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta pemanfaatan teknologi untuk partisipasi digital. Pengelolaan fenomena populisme juga penting. Penguatan partisipasi berkualitas, penegakan hukum, reformasi kelembagaan, dan pengelolaan isu sosial-politik secara konstruktif krusial untuk mewujudkan demokrasi yang substantif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Demokrasi Indonesia, Partisipasi Politik, Tantangan Demokrasi, Penguatan Demokrasi, Reformasi, Masyarakat.

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme yang transparan dan inklusif. Di Indonesia, perjalanan demokrasi mengalami dinamika yang panjang serta penuh tantangan. Sejak kemerdekaan, sistem demokrasi Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari era Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), hingga masa Orde Baru (1966-1998) yang bercirikan otoritarianisme. Baru pada era Reformasi tahun 1998, demokrasi Indonesia memasuki babak baru dengan komitmen untuk memperkuat kebebasan politik, supremasi hukum, dan keterbukaan.

Meskipun mengalami kemajuan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat keberlanjutan demokrasi substansial. Salah satu tantangan terbesar ialah fenomena oligarki politik, di mana kekuasaan politik cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Dominasi ini menciptakan ketimpangan representasi dan mengurangi peluang masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam proses politik. Selain itu, korupsi yang meluas di berbagai tingkatan pemerintahan semakin memperburuk kualitas demokrasi, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, dan menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Rendahnya partisipasi masyarakat

Pengaruh Partisipasi Politik Masyarakat terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia

juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif rakyat adalah elemen kunci untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi publik. Namun, fenomena golput yang tinggi dalam pemilu, rendahnya literasi politik, serta ketidakpedulian masyarakat terhadap isu-isu politik menjadi indikator lemahnya keterlibatan warga negara. Tantangan ini diperparah oleh ketimpangan sosial-ekonomi yang membatasi akses masyarakat tertentu terhadap pendidikan dan informasi politik yang memadai. Di sisi lain, munculnya polarisasi sosial akibat politik identitas menjadi ancaman nyata bagi kohesi sosial. Isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sering kali dimanfaatkan oleh elite politik untuk kepentingan elektoral, yang pada akhirnya memperdalam jurang perpecahan di tengah masyarakat. Polarisasi ini tidak hanya menghambat proses demokrasi, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial dan politik jangka panjang.

Dalam konteks ini, penguatan demokrasi berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi yang paling relevan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Demokrasi berbasis masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama dalam demokrasi, diharapkan terbentuk sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi demokrasi di Indonesia sekaligus menawarkan solusi strategis untuk memperkuat demokrasi berbasis masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis literatur, data empiris, dan studi kasus, artikel ini berfokus pada tiga aspek penting, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, reformasi kelembagaan, dan penguatan pendidikan politik. Melalui langkah-langkah ini, demokrasi di Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya menjunjung nilai-nilai kebebasan politik, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, atau dikenal dengan studi literatur, yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Rumusan masalah yang diangkat adalah untuk mengetahui Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Penelitian ini menggunakan sumber data dari berbagai literatur,

antara lain buku, artikel, dan jurnal ilmiah, baik edisi cetak maupun online. Sumber-sumber data tersebut dipilih dan dipilah sesuai dengan topik kajian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid. Teknik yang digunakan adalah studi literatur berdasarkan data sekunder dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Referensi diperoleh dari jurnal ilmiah yang relevan dan bereputasi untuk mendukung analisis terkait partisipasi politik masyarakat dan kualitas demokrasi. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menyusun argumen yang terintegrasi dan saling terkait.

Hasil dan Pembahasan

A. Dinamika Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era Reformasi. Setelah hampir 32 tahun berada di bawah rezim otoritarian Orde Baru, era Reformasi membawa angin segar berupa kebebasan politik, desentralisasi, dan penegakan supremasi hukum. Pemilu langsung mulai diterapkan, dan masyarakat diberi kebebasan untuk mengorganisir diri dalam berbagai bentuk partisipasi politik, baik melalui organisasi masyarakat sipil (OMS) maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan politik seperti pemilu, demonstrasi, atau diskusi kebijakan.

Namun, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat tercapainya demokrasi substantif. Demokrasi substantif bukan hanya sekadar pelaksanaan prosedur demokrasi (seperti pemilu), tetapi mencakup prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, transparansi, dan inklusivitas dalam proses politik. Dalam konteks Indonesia, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih matang.

B. Teori Demokrasi

Tiga teori demokrasi dalam klasifikasi Gould adalah:

1. Model Individualisme Liberal: Model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Ini menekankan kesamaan hak bagi seluruh rakyat dalam proses politik, ditandai oleh prinsip "satu orang satu suara" (one man one vote).
2. Model Pluralis: Teori ini muncul dari pemikiran para teoritis seperti Madison, Dewey, Dahl, dan Berelson. Pluralisme menekankan kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individu, di mana

Pengaruh Partisipasi Politik Masyarakat terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia

demokrasi politik berfungsi untuk mengatasi konflik dalam mencapai keseimbangan sosial. Pluralisme melindungi kebebasan individu dengan menyediakan alternatif politik yang mewakili berbagai kelompok kepentingan.

3. Model Sosialisme Holistik: Pendekatan ini menekankan demokrasi ekonomi sebagai respons terhadap individualisme liberal. Teori ini terdiri dari dua jenis: satu memahami demokrasi ekonomi sebagai distribusi barang secara adil dalam konteks demokrasi politik, sedangkan yang lain menekankan perlunya kontrol atas produksi dan distribusi.

Gould menilai bahwa demokrasi liberal lebih menekankan partisipasi individu dalam pengambilan keputusan, sementara sosialisme holistik memahami masyarakat secara keseluruhan sebagai entitas utama.

C. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

Tingkat partisipasi dalam pemilu nasional terus meningkat sejak 1999. Namun, kualitas partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran politik yang tinggi. Banyak masyarakat yang terlibat hanya sebagai pemilih pasif tanpa pemahaman mendalam terhadap visi, misi, dan program kandidat yang akan dipilih nantinya.

Partisipasi politik tidak hanya pada pemilu, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan. Sayangnya, tingkat partisipasi dalam proses ini masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme keterlibatan dalam pengambilan keputusan kebijakan dan cenderung sulit terlibat karena keterbatasan waktu dan akses.

Adapun tingkat kesadaran politik masyarakat Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar masyarakat hanya memahami politik secara sederhana, seperti memilih dalam pemilu, tanpa menyadari peran mereka dalam pengawasan atau advokasi.

D. Tantangan dalam Proses Demokrasi

1. Politik Uang (Money Politics): Politik uang menjadi tantangan besar dalam demokrasi Indonesia, sering kali merusak integritas pemilihan. Dalam konteks pemilu, politik uang sering digunakan untuk membeli suara pemilih atau memobilisasi dukungan massa. Hal ini menciptakan siklus patronase yang sulit diputus dan berdampak pada hasil suara karena kandidat dengan kekuatan finansial

lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang mengedepankan visi dan misi.

2. Minimnya Partisipasi Politik yang Berkualitas: Tingginya partisipasi tidak selalu diimbangi dengan kualitas pilihan yang baik; pendidikan politik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemilih. Banyak masyarakat Indonesia yang memilih calon pemimpin berdasarkan kedekatan yang emosional.

3. Polarisasi Sosial dan Politik: Polarisasi diperparah oleh perbedaan ideologi dan afiliasi politik, sering kali memicu konflik horizontal tetapi juga merusak solidaritas nasional.

4. Korupsi dalam Institusi Demokrasi: Korupsi di lembaga-lembaga demokratis melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem.

5. Kebebasan Pers yang Terancam: Meskipun dijamin oleh undang-undang, ancaman terhadap jurnalis masih sering terjadi. Ancaman itu ada dalam intimidasi, ancaman hukum, bahkan kekerasan fisik.

6. Pendidikan Politik yang Lemah: Kurangnya pendidikan politik menyebabkan rendahnya pemahaman warga negara tentang hak dan kewajiban mereka.

7. Reformasi Birokrasi yang Lambat: Lambatnya reformasi birokrasi menghambat pelaksanaan kebijakan demokratis.

8. Ketidaksetaraan Akses Informasi dan Pendidikan Politik: Terdapat kesenjangan dalam akses informasi dan pendidikan politik yang berakibat partisipasi politik tidak merata.

9. Pengaruh Politik Identitas: Penggunaan isu-isu identitas dalam politik dapat memecah belah masyarakat dan pengalihan fokus isu-isu substansial.

10. Ketidaksetaraan Sosial-Ekonomi: Ketidaksetaraan menjadi tantangan signifikan yang mengancam stabilitas demokrasi.

11. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: pelanggaran terhadap kelompok minoritas dan aktivis yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

12. Radikalisme dan Ekstremisme: penyebaran paham radikal dan ekstrem dapat mengancam stabilitas nasional.

13. Dominasi Oligarki: Kekuasaan yang didominasi oleh segelintir elite kayadan sangat berpengaruh kuat di Indonesia.

14. Kelembagaan Demokrasi yang Lemah: Institusi demokrasi, parlemen, dan lembaga pengawas masih lemah dalam menjalankan fungsi fungsinya.

Pengaruh Partisipasi Politik Masyarakat terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia

15. Rendahnya Representasi Perempuan dalam Politik: Keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat rendah, meskipun ada kuota 30% untuk perempuan di parlemen.
16. Pengaruh Media Sosial yang Tidak Terkendali: Media sosial sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian.
17. Ketergantungan pada Pemimpin Karismatik: Demokrasi sering bergantung pada figur pemimpin yang karismatik daripada pada sistem yang kuat.
18. Konflik Kepentingan dalam Kebijakan Publik: konflik ini melibatkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
19. Keberlanjutan Demokrasi di Daerah: Pelaksanaan demokrasi sering terganggu oleh dinasti politik, korupsi, dan kurangnya partisipasi masyarakat.
20. Intervensi Asing dalam Politik Domestik: Intervensi asing dalam bentuk bantuan dan sebagainya dapat memengaruhi kebijakan dalam negeri.

E. Upaya Penguatan Demokrasi Berbasis Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas dan tingkat partisipasi politik masyarakat, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, diantaranya

1. Pendidikan Politik Inklusif: Pemerintah dan organisasi masyarakat harus menyediakan pendidikan politik yang melibatkan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok marjinal.
2. Penguatan Peran Media sosial: Media sosial juga harus menjadi penyedia informasi politik yang akurat, netral, serta mendidik.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan melalui mekanisme formal dan informal.
4. Penggunaan Teknologi: Mendorong partisipasi digital melalui platform yang mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam proses kebijakan.

F. Populisme sebagai Fenomena Sosial

Dalam konteks politik kontemporer, populisme telah muncul sebagai respons masyarakat umum terhadap sistem sosial dan politik yang dianggap korup. Pemimpin karismatik memainkan peran penting dalam konstruksi narasi yang mewakili masyarakat umum untuk melawan para elit politik.

Namun, perlu dicatat bahwa populisme juga dapat menyebabkan polarisasi masyarakat.

Dinamika demokrasi menunjukkan bahwa populisme dapat berkembang karena ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Meskipun populisme sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, populisme memiliki potensi untuk menciptakan ruang partisipasi politik yang lebih luas jika dikelola secara efektif.

Kesimpulan

Terlepas dari kemajuan besar yang telah dicapai oleh Indonesia sejak Reformasi, sistem demokrasi Indonesia masih terus menghadapi berbagai tantangan. Transisi menuju sistem yang lebih transparan telah menghasilkan peningkatan partisipasi politik. Namun, prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas belum sepenuhnya terwujud melalui penerapan metodologi demokrasi, termasuk partisipasi politik yang tidak memadai, di mana jumlah pemilih tidak selalu sesuai dengan pengetahuan politik yang memadai, dan kendala dalam keterlibatan dalam proses kebijakan lokal. Tantangan konvensional, seperti korupsi, politik uang, dan hambatan terhadap kebebasan pers, terus menghambat kemajuan. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai oleh Indonesia sejak Reformasi, sistem demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Transisi menuju sistem yang lebih transparan telah menghasilkan peningkatan partisipasi politik. Namun, prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas belum sepenuhnya terwujud melalui penerapan metodologi demokrasi, termasuk partisipasi politik yang tidak memadai, di mana jumlah pemilih tidak selalu sesuai dengan pengetahuan politik yang memadai, dan kendala dalam keterlibatan dalam proses kebijakan lokal. Tantangan konvensional, seperti korupsi, politik uang, dan hambatan terhadap kebebasan pers, terus menghambat kemajuan.

Pendekatan multidimensi sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada, yaitu polarisasi sosial dan politik, akses yang tidak merata terhadap informasi dan pendidikan politik, dominasi oligarki, dan lemahnya lembaga-lembaga demokrasi. Strategi penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini adalah dengan memperkuat demokrasi berbasis masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan pendidikan politik yang inklusif, pemanfaatan media sosial secara bijaksana, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan penggunaan teknologi untuk mendorong partisipasi digital. Untuk meningkatkan demokrasi Indonesia, pendekatan multifaset sangat penting, dengan fokus pada peningkatan kualitas partisipasi, penegakan hukum, reformasi kelembagaan, dan pengelolaan isu-isu

Pengaruh Partisipasi Politik Masyarakat terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia

sosial-politik yang konstruktif untuk mencapai demokrasi yang substantif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alvira Oktavia Safitri, Dinie Anggraeni Dewi, & Yayang Furi Furnamasari. (n.d.). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pribadi yang Berkarakter pada Anak Sekolah Dasar. Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari <https://jbasic.org/index.php/basicedu>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014. Jakarta.
- Bachtiar Nur Budiman. (2021). Populisme di Indonesia sebagai Ancaman Polarisasi Masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Diakses dari <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/53/21>
- Cintya Diva, Rahayu, & Siti Tiara Maulia. (2021). Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Universitas Jambi. Diakses dari <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3220/3029>